

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan sebagai sektor strategis yang memiliki fungsi utama dalam membentuk dan meningkatkan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan dan daya saing suatu bangsa. Melalui Pendidikan generasi bangsa dididik, dibina, dibimbing untuk memperoleh pengetahuan dan kecakapan hidup. Oleh sebab itu, dalam menjalankan pendidikan, diperlukan dukungan dari kebijakan yang menyeluruh, termasuk dalam hal pembiayaan yang adil, dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mencakup semua aspek terkait penyelenggaraan pendidikan, termasuk masalah pembiayaan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan keberimbangan akses, mutu, dan kelangsungan pendanaan pendidikan di semua jenjang. Namun, dalam pelaksanaannya, masalah pembiayaan pendidikan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar yang memiliki keterbatasan dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya manusianya.

Sebagai jawaban atas masalah tersebut, pemerintah meluncurkan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang berfungsi sebagai sumber

utama pembiayaan operasional sekolah. Program ini dibuat untuk membantu memenuhi biaya operasional satuan pendidikan, termasuk pembayaran gaji, pengadaan alat tulis, pemeliharaan fasilitas, serta pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 dengan jelas menyatakan bahwa dana BOSP digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan sesuai dengan komponen yang sudah ditentukan dalam petunjuk teknis. Oleh karena itu, BOSP memiliki peranan penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan, terutama bagi satuan pendidikan yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan merupakan program yang ditetapkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah, digunakan untuk membiayai honor, kebutuhan ATK, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelaksanaan program pengembangan institusi sekolah. Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung sektor pendidikan khususnya dalam penguatan dan pengembangan berbagai program kegiatan sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan Pasal 37 ayat 1 “Dana BOSP digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.” (Permendikdasmen, Hal 15, 2025). Menurut Suandi (2019), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “BOSP adalah salah satu program pemerintah di bidang

pendidikan yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Peranan penting Dana BOSP menjadi nyata ketika dikaitkan dengan wilayah daerah 3T, termasuk kabupaten Paniai. Keterbatasan akses pendidikan, minimnya fasilitas pendidikan, serta kurangnya tenaga pengajar menjadikan BOSP sebagai sumber pendanaan utama bahkan satu-satunya bagi sekolah untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Penggunaan dan pemanfaatan dana BOSP yang sesuai diharapkan dapat menurunkan kesenjangan dalam pendidikan, mengurangi jumlah siswa putus sekolah, dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan di area tersebut.

Meskipun demikian, keberhasilan program BOSP tidak hanya tergantung pada jumlah dana yang dialokasikan, tetapi sangat dipengaruhi oleh seberapa baik dana tersebut dikelola di tingkat sekolah. Pengelolaan dana BOSP melibatkan kegiatan manajerial yang memerlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang teratur serta mengikuti petunjuk teknis yang berlaku. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran penting sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di sekolah. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin dan manajer yang menetapkan arah kebijakan sekolah, termasuk dalam membuat RKAS, membentuk tim pengelola BOSP, membuat keputusan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran.

Keterampilan manajemen yang baik perlu dimiliki oleh satuan pendidikan dalam mengatur dan menetapkan program yang dirumuskan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, pimpinan sekolah menjadi penentu kemajuan serta perkembangan satuan pendidikan. Kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam mengelola sistem manajemen pendidikan yang berfungsi mengoordinasikan seluruh aktivitas sekolah, mencakup penyusunan rencana kerja, pelaksanaan program, proses pengendalian, hingga pelaksanaan evaluasi kegiatan. “kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan formal mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya” (Muhammad Abrori, dkk, 2020).

Dalam manajemen perencanaan Program sekolah, kepala sekolah bertanggungjawab dalam menyusun setiap kegiatan yang berkaitan dengan seluruh administrasi sekolah, termasuk Anggaran dan Rencana Kegiatan Sekolah (RKAS). Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 pasal 12 ayat 1 bahwa “Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”. Menurut Nikolaus Anggal, dkk, (Nikolaus, 2020) “Kepala Sekolah dituntut memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif/prakarsai untuk meningkatkan mutu sekolah.

Manajemen yang dijalankan secara tepat akan memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya sasaran program BOSP secara optimal melalui pemanfaatan

sumber daya yang terencana dan terukur (Zulkifli Umar et.al. 2024). Keberhasilan pencapaian target program sangat dipengaruhi oleh adanya kemampuan manajemen yang dapat mencapai sasaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana BOSP yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara sistematis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Penelitian ini dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Distrik Paniai Timur mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan merupakan satuan pendidikan yang menerima dana BOSP. Distrik Paniai Timur merupakan distrik yang ada di wilayah ibukota Kabupaten Paniai, dan merupakan wilayah yang heterogen secara sosial-ekonomi. Kepala-kepala sekolah dan Tenaga pendidik yang ada di wilayah distrik Paniai timur merupakan representasi pendidikan di kabupaten Paniai secara keseluruhan, dan basis pendidikan.

Fakta Empiris di Distrik Paniai Timur, pengelolaan dana BOSP masih menghadapi berbagai masalah yang serius. Beberapa satuan pendidikan belum mampu memanfaatkan kolaborasi dalam melakukan perencanaan anggaran BOSP sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Akan tetapi, penyusunan anggaran dikerjakan sepenuhnya oleh operator sekolah,

sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara Pembelanjaan yang berbasis kebutuhan sekolah. Keadaan ini membawa dampak pada penggunaan dana yang kurang efisien, tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan pendidikan, dan berpotensi melenceng dari petunjuk teknis yang berlaku.

Berdasarkan pra-observasi dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di beberapa satuan pendidikan, dari data yang peneliti peroleh, ditemukan adanya masalah yang terjadi, terdapat beberapa satuan pendidikan belum melakukan konfirmasi dalam realisasi, dan beberapa di antaranya berpotensi mengalami silpa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BOSP membutuhkan peningkatan sumber daya pendidikan yang memiliki kemampuan secara teknik dalam menyelesaikan pelaporan baik di aplikasi RKAS maupun dalam bentuk Hardcopy. Masalah kemampuan manajemen yang peneliti temukan bahwa 7 dari 10 kepala sekolah memiliki kemampuan yang sangat lemah dalam menyusun dan merencanakan program Sekolah. Di samping itu, informasi yang peneliti peroleh melalui hasil diskusi bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai Agus Kobepa, M.Pd menyebutkan bahwa sejak tiga tahun terakhir masih terdapat data yang menunjukkan bahwa dari 12 satuan pendidikan terdapat 7 sekolah yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban BOSP belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta kekurangan bukti fisik penggunaan dana dan keterlambatan dalam pelaporan, semuanya mencerminkan rendahnya mutu pengawasan dan kontrol

manajerial dalam pengelolaan BOSP. Akibatnya, program sekolah menjadi tidak efektif dan kurang mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara optimal.

Terkait dengan masalah Pengawasan dalam pendidikan yang menggandeng keterlibatan masyarakat, khususnya komite sekolah sangat menentukan bagi kemajuan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Peran penting serta Partisipasi sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam realitanya komite sekolah hanya mengisi jabatan struktur yang ada di sekolah, untuk memenuhi standar administrasi laporan sekolah, tetapi sangat minim dalam tanggung jawabnya sebagai mitra strategis sekolah. Keterlibatan dan partisipasi Komite sekolah belum menunjukkan arah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tugas serta tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis sekolah belum cukup maksimal dalam mengambil perannya. Batasan kewenangan, serta Partisipasi komite sekolah menjadi masalah yang sulit diatasi, sehingga posisi strategis komite sekolah tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Dari 5 satuan pendidikan, 4 di antaranya yang peneliti amati bahwa “Partisipasi komite sekolah belum mampu memaksimalkan kewenangan dan perannya dalam membangun kerjasama dalam kemitraannya dengan pihak sekolah.” Oleh karena itu, keberadaan komite sekolah semestinya menjadi salah satu unsur pendukung yang mampu memberikan dorongan nyata dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan.

Sampai saat ini, Penelitian secara mendalam tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan seperti di wilayah 3 T, khususnya Kabupaten Paniai Propinsi Papua Tengah masih sangat jarang dilakukan kajian empiris terkait BOSP. Sebagian besar fokus di wilayah-wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif ini menjadi sangat cocok dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dapat menggali secara mendalam para kepala Sekolah, guru dan Komite Sekolah, serta memahami kondisi wilayah di mana mereka menjalankan tugasnya.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada belum maksimalnya pengelolaan BOSP di Kabupaten Paniai, yang ditandai oleh lemahnya perencanaan RKAS, rendahnya keterlibatan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan anggaran, keterbatasan fungsi pengawasan komite sekolah, serta belum tertibnya pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BOSP tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kapasitas manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi komite sekolah sebagai mitra strategis satuan pendidikan. Sehingga, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan penelitian, sekaligus memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Partisipasi komite sekolah terhadap Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hasil dari Penelitian ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan perbaikan pengelolaan pendidikan yang efektif dan

berkelanjutan demi peningkatan kualitas atau mutu di satuan pendidikan. Penelitian mengenai pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek administratif, akuntabilitas pelaporan, atau efektivitas penggunaan dana pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Penelitian terdahulu juga cenderung menelaah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah atau partisipasi komite sekolah secara terpisah terhadap mutu pendidikan, dan belum banyak yang menguji pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap pengelolaan BOSP.

Secara teoritis, masih terdapat kesenjangan dalam menjelaskan hubungan antara manajemen kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi komite sekolah, dan pengelolaan BOSP dalam satu model penelitian yang terintegrasi. Secara empiris, kondisi di Distrik Paniai Timur menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan RKAS, pelaporan pertanggungjawaban, serta pengawasan komite sekolah dalam pengelolaan BOSP. Selain itu, secara kontekstual, penelitian tentang pengelolaan BOSP di wilayah 3T, khususnya Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, masih sangat terbatas dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan teoritis, empiris, dan kontekstual tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang penelitian yang telah disampaikan, peneliti kemudian menetapkan sejumlah permasalahan yang teridentifikasi untuk dikaji lebih lanjut:

1. Lemahnya kemampuan Manajemen Kepala Sekolah dalam menyusun Perencanaan Anggaran dan Kegiatan sekolah (RKAS), data menunjukkan bahwa 10 kepala sekolah 7 di antaranya tidak mampu menyusun perencanaan anggaran, sehingga penyusunan anggaran dan kegiatan sekolah (RKAS) dikerjakan oleh operator sekolah. Sehingga target penggunaan dana BOSP tidak mencapai target sesuai kebutuhan.
2. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa fungsi kontrol Komite sekolah terhadap proses pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan belum berjalan secara optimal sehingga pengawasan belum memberikan dampak yang signifikan.
3. Dalam 3 tahun terakhir terdapat 11 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOSP yang dilaporkan oleh kepala sekolah, dikembalikan dan diperbaiki, dan melampirkan bukti belanja dari dana yang digunakan oleh kepala sekolah.
4. Jumlah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang dialokasikan untuk pembelian ATK Sekolah serta pembiayaan kegiatan operasional

dinilai sangat terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan riil sekolah.

5. Terdapat beberapa ketua komite tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan BOSP.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga kejelasan ruang lingkup kajian serta memastikan penelitian berjalan secara sistematis, pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada variabel tertentu yang telah ditetapkan

- a. Variabel X1/bebas = Manajemen Kepemimpinan kepala Sekolah
- b. Variabel X2/Bebas = Partisipasi Komite sekolah
- c. Variabel Y/terikat = Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan masalah, rumusan masalah penelitian ini dipaparkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan manajemen kepemimpinan kepala sekolah terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Paniai?
2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi komite sekolah terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Paniai?

3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi komite sekolah secara simultan terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Paniai?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan maksud untuk mencapai beberapa sasaran utama yang telah dirumuskan secara terperinci sesuai fokus kajian:

1. Menganalisis pengaruh manajemen kepemimpinan kepala sekolah terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
2. Menganalisis pengaruh partisipasi komite sekolah terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
3. Menganalisis pengaruh manajemen kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi komite sekolah secara simultan terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat teoritis dan praktis yang berkelanjutan bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan bagi peningkatan mutu satuan pendidikan.

1. Manfaat Teoritis:
 - a) Kontribusi bagi ilmu manajemen pendidikan dan bagi sekolah yang berada di daerah 3T.

- b) Kontribusi bagi masyarakat tentang bagaimana partisipasi komite sekolah terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- c) Kontribusi bagi kepala sekolah dan guru tentang bagaimana manajemen pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di daerah 3T.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi kepala sekolah, pengawas pendidikan, serta pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan BOSP.

